

## ANALISIS KOLABORASI INTERPROFESIONAL BERJENJANG ANTARA GURU BK DAN KESISWAAN DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA PRAYATNA MEDAN

Melati Putri Agnesia Lubis<sup>1\*</sup>, Sesilia Fransiska Br Ginting<sup>2</sup>, Evan Raja Natanael  
Siregar<sup>3</sup>, Arlia Ananta Salsabila<sup>4</sup>, Nindya Ayu Pristanti<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Pendidikan Bimbingan & Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Medan

\*Penulis Korespondensi: [melatilubis93@gmail.com](mailto:melatilubis93@gmail.com), [sesiliafransiska1@gmail.com](mailto:sesiliafransiska1@gmail.com),  
[evansiregar2024@gmail.com](mailto:evansiregar2024@gmail.com), [arliaanantasalsabilaa@gmail.com](mailto:arliaanantasalsabilaa@gmail.com), [nindyapristanti@unimed.ac.id](mailto:nindyapristanti@unimed.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of tiered interprofessional collaboration between Guidance and Counseling (BK) teachers and the Student Affairs Department, as well as to examine it from the perspective of the Code of Ethics for Guidance and Counseling at Prayatna High School Medan. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data collection was conducted through in-depth interviews with guidance and counseling teachers and the distribution of a Guttman-scale questionnaire online via Google Forms to 30 students, primarily from the 11th grade. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that the handling of student issues particularly cases of absenteeism and conflicts among peers follows a structured, tiered process, beginning with subject teachers subject teachers, homeroom teachers, guidance counselors, and the Student Affairs Office, in accordance with the limits of their respective authorities and without any overlap of roles. The handling of sensitive cases is conducted confidentially in a dedicated room to protect student privacy and is supported by the separation of general disciplinary data from personal counseling data in accordance with the need-to-know principle and the ABKIN Code of Ethics. The school implements educational sanctions without physical violence, and the decision to terminate a student's enrollment rests solely with the Student Affairs Office if the student resists counseling. Ethical compliance and the clarity of this process were confirmed by the results of a student survey, with an approval rate of 93.3% (28 students) who felt safe, understood the handling procedures, and believed that the confidentiality of their issues was maintained in the guidance counseling room. Tiered collaboration that adheres to the code of ethics can create effective guidance services, free from the stigma of school police, and foster trust among students.*

**Keywords:** *Tiered Collaboration, Guidance Counselors, Student Affairs Office, Counseling Code of Ethics, Confidentiality*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi interprofesional berjenjang antara Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dengan bagian Kesiswaan serta meninjaunya dari perspektif Kode Etik Bimbingan dan Konseling di SMA Prayatna Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama Guru BK serta penyebaran angket skala Guttman secara daring melalui Google Form kepada 30 siswa mayoritas kelas XI. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan masalah siswa terutama kasus absensi dan perselisihan antarteman sebaya berjalan melalui alur berjenjang yang terstruktur, dimulai dari Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Guru BK, hingga bagian Kesiswaan sesuai batas wewenang masing-masing tanpa adanya tumpang tindih peran. Penanganan kasus sensitif dilakukan secara tertutup di ruang khusus guna melindungi privasi siswa, serta didukung oleh pemisahan data umum kedisiplinan dan data pribadi konseling sesuai prinsip *need-to-know basis* dan standar Kode Etik ABKIN. Sekolah menerapkan sanksi edukatif tanpa kekerasan fisik, dan keputusan studi murni menjadi wewenang Kesiswaan apabila siswa resisten terhadap pembinaan konseling. Kepatuhan etik dan kejelasan alur ini terkonfirmasi dari hasil angket siswa dengan persentase persetujuan mencapai 93,3% (28 siswa) yang merasa aman, memahami prosedur penanganan, dan meyakini kerahasiaan masalah mereka

terjaga di ruang BK. Kolaborasi berjenjang yang mematuhi kode etik mampu menciptakan layanan pembinaan yang efektif, bebas stigma polisi sekolah, serta menumbuhkan kepercayaan peserta didik.

**Kata kunci:** Kolaborasi Berjenjang, Guru BK, Kesiswaan, Kode Etik Konseling, Kerahasiaan

## **1. LATAR BELAKANG**

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) peserta didik berada pada fase perkembangan remaja akhir yang penuh dengan dinamika pencarian jati diri, gejolak emosional, serta penyesuaian sosial yang kompleks. Dinamika psikososial ini kerap memicu permasalahan perilaku di lingkungan sekolah, seperti ketidakhadiran tanpa keterangan hingga perselisihan antarsiswa. Jika permasalahan kedisiplinan dan hubungan interpersonal ini tidak dikelola secara sistematis, proses tumbuh kembang siswa di sekolah akan terhambat dan berisiko menurunkan motivasi belajar mereka (Akbar et al., 2024; Samuel et al., 2023).

Untuk menangani permasalahan tersebut, keberhasilan layanan pendidikan di sekolah tidak dapat hanya dibebankan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas semata, melainkan memerlukan sinergi terpadu melalui *collaborative guidance and counseling*. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peran kunci dalam memberikan layanan preventif, kuratif, dan preservatif yang mengedepankan pendekatan psikopedagogis (Mufidah & Muis, 2018; Prayitno, 2021). Di sisi lain, bagian Kesiswaan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bertanggung jawab dalam menegakkan tata tertib, memelihara ketertiban lingkungan belajar, dan mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran disiplin (Junita & Afrida, 2026).

Namun dalam praktiknya, sering ditemukan di berbagai sekolah bahwa guru BK dipersepsikan secara keliru sebagai polisi sekolah, yang berdampak pada munculnya rasa takut, ketidakpercayaan, dan keengganan siswa untuk memanfaatkan ruang BK secara sukarela. Agar situasi disfungsi peran tersebut tidak terjadi, kolaborasi antara guru BK dan struktur kesiswaan harus berjalan dalam kerangka kerja berjenjang yang tegas dan berlandaskan pada prinsip Kode Etik Bimbingan dan Konseling (ABKIN, 2018). Kode etik ini mewajibkan konselor untuk menjunjung asas kerahasiaan, mengutamakan kepentingan terbaik konseli membedakan antara data pribadi konseling dengan data umum kesiswaan, serta mempertahankan sikap objektif tanpa prasangka.

Fenomena kerja sama interprofesional ini tampak nyata dalam praktik di SMA Prayatna Medan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan wawancara dengan Guru BK

di SMA Prayatna Medan, permasalahan yang paling jamak dijumpai berpusat pada masalah absensi/kehadiran dan perselisihan antarsiswa. Menariknya, SMA Prayatna Medan telah menerapkan mekanisme penanganan kasus yang terstruktur secara berjenjang, dimulai dari penanganan awal oleh Guru Mata Pelajaran, koordinasi dengan Wali Kelas, pendampingan intensif oleh Guru BK, hingga eskalasi ke bagian Kesiswaan apabila permasalahan membutuhkan penegakan kebijakan institusional. Sepanjang alur ini berlangsung, setiap pihak saling menghormati batas kewenangan masing-masing tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Penerapan perspektif kode etik di SMA Prayatna Medan juga tercermin dari komitmen menjaga kerahasiaan dan privasi peserta didik. Penanganan kasus-kasus yang berkategori sensitif dilakukan secara tertutup di ruang khusus guna melindungi aib dan martabat siswa, sejalan dengan standar kode etik ABKIN (2018) serta temuan Harahap et al. (2022) dan Rizky et al. (2025) mengenai pentingnya penyaringan informasi rahasia konseling. Pihak sekolah mengedepankan pendekatan pembinaan dan layanan konseling daripada tindakan represif; sanksi yang diterapkan bersifat mendidik mulai dari tugas kebersihan hingga pemanggilan orang tua secara bertahap dan menolak sama sekali penggunaan hukuman fisik. Pihak Kesiswaan baru mengambil alih keputusan pengembalian siswa kepada orang tua sebagai langkah terakhir apabila siswa telah terbukti resisten terhadap tahapan pembinaan dan pihak BK menyatakan sudah di luar batas kewenangan penanganan sekolah.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil survei awal terhadap 30 siswa mayoritas kelas XI SMA Prayatna Medan menggunakan skala Guttman, di mana sebanyak 93,3% (28 siswa) menjawab Ya terkait kejelasan alur penanganan, rasa aman, dan terjaganya kerahasiaan saat berkonsultasi dengan Guru BK. Meski terdapat 2 siswa yang merasa saran belum sepenuhnya tepat, temuan ini menunjukkan tingginya kepercayaan siswa terhadap layanan BK yang ada.

Kepercayaan ini tetap terjaga meskipun sekolah membina sekitar 270 siswa dengan keterbatasan jumlah personel BK dan tim kesiswaan, yang rasionya melampaui ketentuan ideal Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Pelayanan tetap berjalan kondusif karena Guru BK bekerja sesuai koridor profesinya tanpa intervensi tugas di luar batas keprofesionalan. Selain itu, komunikasi yang terbuka serta mekanisme sanksi internal

sekolah yang berjenjang membantu menjaga profesionalisme seluruh pihak dalam menangani permasalahan siswa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah. Menurut Abdul Fattah Nasution (2023), metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci guna menghasilkan data berupa kata-kata, uraian naratif, dan pemahaman kontekstual yang utuh. Fokus penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan kolaborasi interprofesional berjenjang antara Guru BK dan bidang Kesiswaan serta penerapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling di SMA Prayatna Medan.

Penelitian dilaksanakan di SMA Prayatna Medan dengan penentuan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian terdiri atas Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai narasumber utama untuk menggali mekanisme kerja sama, batasan wewenang dengan pihak kesiswaan, dan penjagaan kerahasiaan konseling. Selain itu, penelitian melibatkan 30 siswa mayoritas kelas XI sebagai responden penerima layanan untuk mengetahui persepsi mereka mengenai kejelasan prosedur bimbingan, rasa aman, serta keterjagaan privasi masalah di sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam dan penyebaran angket. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan Guru BK menggunakan model wawancara tidak terstruktur. Merujuk pada pandangan Abdul Fattah Nasution (2023), wawancara merupakan percakapan tanya-jawab langsung untuk memperoleh keterangan serta pengalaman mendalam narasumber secara terbuka dan jujur. Teknik ini digunakan untuk menggali alur penanganan masalah siswa, pembagian peran dengan kesiswaan, penanganan data sensitif, hingga penegakan etika guru di sekolah.

Sebagai data pendukung triangulasi, peneliti menyebarkan kuesioner secara digital melalui Google Form kepada 30 siswa kelas XI di SMA Prayatna Medan. Menurut Utama dalam Abdul Fattah Nasution (2023), kuesioner adalah kumpulan pertanyaan tertulis untuk menjaring data pandangan responden. Angket ini memuat 10 pertanyaan berskala Guttman dengan opsi jawaban “Ya” atau “Tidak” untuk mengukur kejelasan alur penanganan masalah, rasa aman saat berkonsultasi, dan kepastian terjaganya kerahasiaan

siswa. Data angket ini melengkapi hasil wawancara agar kondisi kolaborasi dan kepatuhan kode etik dapat terverifikasi secara utuh dari sudut pandang siswa.

Analisis data dilakukan melalui tahapan interaktif model Miles dan Huberman, yang diawali dengan reduksi data berupa penyaringan dan pengelompokan hasil wawancara serta angket siswa. Data yang telah terorganisir kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan uraian persentase sederhana dari hasil skala Guttman. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara cermat untuk memastikan temuan penelitian benar-benar mencerminkan praktik nyata kolaborasi berjenjang dan penegakan kode etik konseling di SMA Prayatna Medan secara valid.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama Guru BK serta penyebaran angket dengan skala Guttman kepada 30 siswa mayoritas kelas XI di SMA Prayatna Medan, diperoleh gambaran jelas mengenai bagaimana kolaborasi berjenjang diterapkan serta bagaimana prinsip etika profesi bimbingan dan konseling ditegakkan di lingkungan sekolah. Temuan-temuan lapangan tersebut dijabarkan dan dianalisis secara deskriptif melalui sub-sub pembahasan berikut:

#### **Pola Kasus Siswa dan Mekanisme Kolaborasi Berjenjang Antarpersonel Sekolah**

Permasalahan peserta didik yang paling mendominasi di SMA Prayatna Medan berpusat pada masalah kehadiran atau absensi dan perselisihan antarteman sebaya. Kondisi ini dipandang sebagai dinamika perkembangan psikososial remaja pada umumnya, yang membutuhkan pola penanganan terstruktur agar tidak mengganggu suasana pembelajaran secara luas. Sekolah mengelola permasalahan tersebut melalui alur penanganan bertahap yang melibatkan empat tingkatan personel, yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, dan bagian kesiswaan.

Pada tahap awal, guru mata pelajaran berfungsi sebagai pihak pertama yang mendeteksi indikasi ketidakhadiran siswa atau meredakan perselisihan langsung saat proses belajar mengajar berlangsung. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan di dalam kelas, kasus diteruskan kepada wali kelas yang akan melakukan pendekatan awal serta menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Ketika pendekatan wali kelas belum membuahkan perubahan perilaku, siswa dialihkan kepada guru BK untuk memperoleh pendampingan psikopedagogis dan konseling pribadi yang mendalam. Bagian kesiswaan

baru dilibatkan pada tingkatan akhir apabila pelanggaran menyangkut kedisiplinan tingkat lanjut atau membutuhkan ketegasan sanksi administratif sekolah.

Mekanisme penanganan bertingkat di SMA Prayatna Medan terbukti efektif mencegah tumpang tindih peran, karena setiap pihak saling menghormati wewenang tanpa adanya intervensi dari guru lain ataupun kepala sekolah. Hal ini juga memperkuat konsep sistem dukungan konseling di mana efektivitas layanan bimbingan sangat ditopang oleh kejelasan alur kerja sama di antara seluruh pemangku kepentingan sekolah.

### **Penerapan Asas Kerahasiaan Konseling Melalui Transmisi Informasi Terbatas**

Salah satu dilema etis terbesar dalam kolaborasi antara guru BK dan pihak sekolah adalah risiko terbukanya rahasia pribadi konseli. Di SMA Prayatna Medan, guru BK dan bagian kesiswaan menerapkan komitmen yang kuat untuk melindungi martabat dan kerahasiaan masalah siswa. Kasus-kasus yang berkategori sensitif tidak pernah dibicarakan secara bebas di ruang guru, melainkan selalu ditangani di ruangan tertutup dan khusus agar terhindar dari pendengaran pihak luar atau teman sekelasnya.

Selain menyediakan tempat khusus, perlindungan hak konseli diterapkan melalui pemisahan informasi secara ketat. Guru BK membedakan secara tegas antara data umum kedisiplinan dengan catatan psikologis yang bersifat pribadi. Informasi yang dibagikan kepada pihak kesiswaan hanya dibatasi pada fakta perilaku yang relevan untuk kebutuhan evaluasi pembinaan, sedangkan riwayat keluarga yang bersifat sensitif atau pengakuan emosional siswa tetap dirahasiakan sepenuhnya. Langkah ini membuktikan bahwa penanganan administratif tetap dapat berjalan selaras dengan etika kerahasiaan konselor.

Praktik pembatasan informasi tersebut sangat sesuai dengan standar Kode Etik ABKIN (2018) dan sejalan dengan temuan Rizky dkk. (2025) di SMAN 1 Percut Sei Tuan mengenai penerapan prinsip *need-to-know basis*, di mana data konseling hanya boleh diteruskan kepada pihak yang berhak sejauh itu memberikan manfaat langsung bagi pemulihan siswa. Sikap profesional ini menunjukkan bahwa kerja sama antarguru dapat berjalan harmonis apabila masing-masing pihak saling menjaga batas kepercayaan dan menghormati kode etik kerahasiaan data siswa.

### **Pemisahan Peran Pembinaan dan Penegakan Sanksi Institusional**

Di lingkungan pendidikan, guru BK sering kali mendapatkan label yang keliru sebagai figur penghukum atau polisi sekolah, yang kerap memicu ketakutan dan keengganan siswa untuk berkonsultasi secara sukarela. Namun, praktik di SMA Prayatna

Medan berhasil menghilangkan stigma tersebut melalui pemisahan fungsi yang jelas antara pembinaan watak dan penegakan tata tertib sekolah. Guru BK memposisikan diri sepenuhnya sebagai pendengar yang hangat, suportif, dan fasilitator perubahan perilaku, sementara bagian kesiswaan memegang wewenang eksekusi aturan dan pencatatan sanksi disipliner.

Pihak sekolah sama sekali tidak mentolerir adanya hukuman fisik dalam menangani kesalahan siswa. Sanksi yang diterapkan dirancang berjenjang dan bernilai edukatif, mulai dari penugasan kebersihan lingkungan sekolah untuk pelanggaran ringan hingga pemanggilan orang tua secara formal untuk pelanggaran menengah. Keputusan pemutusan studi atau pengembalian siswa kepada orang tua murni menjadi kewenangan bagian kesiswaan dan pimpinan sekolah sebagai langkah terakhir, yakni apabila siswa sudah bersikap resisten dan pihak BK menyatakan masalah tersebut berada di luar batas kapasitas pembinaan sekolah.

Pemisahan peran ini berhasil menciptakan iklim konseling yang humanis dan tidak mengintimidasi, sebagaimana dicita-citakan dalam teori konseling Carl Rogers (1957) mengenai penerimaan tanpa syarat.

### **Respon Siswa dan Penguatan Kepercayaan Terhadap Layanan Konseling**

Keberhasilan kolaborasi berjenjang yang memperhatikan etika konseling ini terbukti secara nyata melalui persepsi positif peserta didik. Berdasarkan hasil pengumpulan data angket skala Guttman terhadap 30 siswa mayoritas kelas XI di SMA Prayatna Medan, diperoleh temuan bahwa mayoritas mutlak siswa, yakni sebanyak 28 orang atau 93,3%, memberikan respon Ya pada seluruh indikator terkait kejelasan alur penanganan masalah, kenyamanan saat diajak berdiskusi, serta rasa aman bahwa rahasia mereka tidak akan dibocorkan oleh guru BK kepada pihak lain.

Tingginya persentase persetujuan ini menandakan bahwa keterbukaan informasi penanganan masalah dan penjagaan privasi di sekolah sudah terbangun dengan sangat baik. Siswa memahami kepada siapa mereka harus melapor dan merasa yakin bahwa ruang BK bukanlah tempat untuk dihakimi atau diadili. Di sisi lain, temuan minoritas yang menunjukkan ada 2 siswa atau sekitar 6,7% yang menjawab Tidak pada butir ketepatan saran pembinaan memberikan masukan yang sangat berharga bagi pengembangan layanan BK ke depan.

Kesenjangan persepsi dari sebagian kecil siswa tersebut mempertegas bahwa konseling remaja selalu berhadapan dengan keunikan latar belakang dan kepribadian siswa yang beragam. Guru BK tidak bisa menyamaratakan seluruh saran bimbingan, melainkan dituntut untuk terus mengembangkan keterampilan empati, fleksibilitas komunikasi, dan pemahaman mendalam terhadap kondisi individu konseli agar setiap masukan yang diberikan dapat diterima secara tepat sasaran oleh siswa yang bersangkutan.

#### **Pengelolaan Beban Kerja dan Mekanisme Etik Internal Sekolah**

Dari segi manajerial, pelaksanaan bimbingan konseling di SMA Prayatna Medan memiliki tantangan tersendiri terkait ketersediaan sumber daya manusia. Sekolah ini membina sekitar 270 orang siswa dengan tim BK dan kesiswaan yang beranggotakan personel terbatas. Secara normatif, kondisi ini melampaui ketentuan rasio ideal konselor terhadap siswa yang diatur dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, yakni 1 banding 150 siswa. Dengan demikian, seluruh dinamika layanan dan penanganan tata tertib siswa tetap dapat berjalan aman dan kondusif.

Faktor pendukung utama kelancaran tersebut adalah kepatuhan pihak sekolah terhadap lingkup keprofesian guru BK. Pihak manajemen sekolah tidak memberikan beban kerja di luar batas profesi bimbingan konseling kepada guru BK, sehingga fokus layanan tetap terjaga. Di samping itu, sekolah memiliki budaya saling mengoreksi melalui jalur komunikasi yang santun. Jika timbul keluhan dari siswa mengenai sikap guru yang dinilai membedakan atau bersikap kurang adil, langkah pertama yang ditempuh adalah dialog secara personal dan pemberian nasihat secara kekeluargaan.

Apabila terdapat oknum tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran berat dan enggan memperbaiki perilakunya, sekolah menjalankan mekanisme sanksi internal secara berjenjang. Penegakan aturan dimulai dari pemanggilan oleh Kepala Sekolah, penerbitan Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3), hingga tindakan evaluasi penugasan di akhir tahun ajaran. Keberadaan mekanisme pengawasan internal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik profesi di sekolah sangat ditentukan oleh ketegasan komitmen pimpinan lembaga dalam mengawasi kinerja para pendidiknya secara berkeadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kolaborasi interprofesional antara Guru BK dan bagian Kesiswaan di SMA Prayatna Medan telah berjalan secara terstruktur melalui alur penanganan

berjenjang, dimulai dari deteksi awal oleh Guru Mata Pelajaran, koordinasi tingkat kelas oleh Wali Kelas, pendampingan konseling pribadi oleh Guru BK, hingga penegakan sanksi administratif oleh Kesiswaan. Mekanisme bertahap ini berjalan efektif karena setiap pihak saling menghormati wewenang masing-masing tanpa adanya tumpang tindih peran atau intervensi tugas di luar batas keprofesionalan.

Dari perspektif kode etik profesi, Guru BK dan pihak sekolah memegang teguh asas kerahasiaan dan perlindungan privasi siswa, yang ditunjukkan melalui penanganan kasus sensitif di ruang khusus tertutup serta penerapan prinsip pembatasan data umum kedisiplinan dengan data rahasia konseling. Sekolah juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang humanis tanpa kekerasan fisik, di mana sanksi yang diterapkan bersifat mendidik dan terukur, serta menempatkan tindakan pengembalian siswa kepada orang tua murni sebagai keputusan administratif Kesiswaan apabila siswa resisten terhadap seluruh proses pembinaan konseling. Keberhasilan kerja sama yang beretika ini diperkuat oleh hasil angket siswa dengan persentase persetujuan mencapai 93,3%, yang membuktikan tingginya rasa aman, kejelasan prosedur, dan kepercayaan peserta didik terhadap layanan bimbingan konseling di sekolah.

## **5. SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pihak sekolah dan manajemen kepemimpinan disarankan untuk terus mempertahankan iklim kerja sama berjenjang yang harmonis, sembari secara bertahap mempertimbangkan penambahan tenaga Guru BK agar rasio beban kerja terhadap jumlah siswa dapat mendekati standar ideal nasional. Bagi Guru BK, disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi personal dan kepekaan dalam memberikan saran pembinaan yang lebih bervariasi sesuai dengan karakteristik unik setiap peserta didik, sekaligus tetap konsisten menjaga batas kerahasiaan konseli dalam koordinasi lintas peran. Bagian Kesiswaan bersama para wali kelas dan guru mata pelajaran diharapkan terus memelihara komunikasi terbuka yang teratur agar setiap gejala masalah absensi maupun perselisihan siswa dapat terdeteksi sejak dini tanpa mengaburkan peran pembinaan konseling.

## **DAFTAR REFERENSI**

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2018). *Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia*. Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

- Habibah, N. (2025). *Manajemen layanan khusus bimbingan dan konseling terhadap perkembangan karakter siswa di SMP Maryam Surabaya*. Fakultas Tarbiyah, Institut Al Fithrah Surabaya.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis pemahaman kode etik profesi konseling pada guru bimbingan dan konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101-110.
- Haurissa, S. A., Ratno, S., Sinaga, J. A. H., Ramadhani, S. I., Simamora, P., Hasibuan, S. A. M., & Siregar, W. S. (2025). Analisis kolaborasi guru BK dan guru mata pelajaran dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswa SMAS Cerdas Murni. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11244-11252.
- Junita, M., & Afrida, Y. (2026). Kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan pihak sekolah dalam menangani siswa bolos di MAN 1 Kota Payakumbuh. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 6(4), 5222-5233. <https://doi.org/10.58578/yasin.v6i4.11327>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mulyani, U., & Irman. (2023). Penerapan kode etik konseling guru BK latar belakang non pendidikan BK dalam melaksanakan layanan BK di sekolah. *JOTE: Journal on Teacher Education*, 4(3), 42-50.
- Muna, N., Laksono, B. A., Shelamitha, N., & Mawaddah. (2025). Analisis kesesuaian praktik etika profesi guru BK dengan standar ABKIN di sekolah SMP, SMA, dan SMK. *Counselle: Journal of Guidance and Counseling*, 5(2), 117-132. <https://doi.org/10.32923/dzv51170>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Pristanti, N. A., Suryani, R., & Marito, Y. (2023). Kode etik guru bimbingan dan konseling dalam bekerjasama dengan rekan sejawat. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 148-155.
- Rizky, A. A., Siregar, D. A., Tarigan, D. M., Nasution, D. L., Siagian, M. A., Hutagalung, O. F., & Sihombing, S. L. (2025). Implementasi etika profesi guru bimbingan dan konseling dalam kolaborasi dengan rekan sejawat di SMA 1 Percut Sei Tuan. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kurikulum dan Pembelajaran*, 1(2), 191-95.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Safitri, B. N. I. (2025). *Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam upaya mengatasi perilaku bullying di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto* (Skripsi sarjana tidak diterbitkan). Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Setiawan, A. (2014). Konsep kolaboratif bimbingan konseling berbasis pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo. *Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 229-256.
- Tumanggor, A. A. A., Jamaris, & Solfema. (2022). Etika konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Nusantara of Research (NOR)*, 9(1a), 54-60.